

Kendala Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Serta Solusinya

Afifah Bidayah*¹, Yarmis Syukur², Riska Ahmad³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

Email: Afifahbidayah99@gmail.com ^{1*}

Abstrak

BK membantu peserta didik mengenali dan mengembangkan potensi juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan berbagai layanan dan kegiatan pendukung BK. Namun terdapat kendala Guru BK/Konselor dalam merealisasikannya. Artikel ini untuk melihat gambaran terhadap kendala Guru BK/Konselor di sekolah dalam melaksanakan pelayanan dan memberikan solusinya. Metode digunakan dalam artikel ini ialah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah usaha guna mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan topik yang sedang di teliti. Hasil yang didapat bahwa masih banyak Guru BK/Konselor yang tidak dapat melaksanakan pelayanan BK dikarenakan tidak adanya jam masuk kelas untuk melaksanakan tugas.

Kata Kunci: *Kendala, Guru Bimbingan dan Konseling, Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Solusinya.*

Abstract

Guidance and Counseling help students recognize and develop their potential as well help solve problems they face by utilizing various services and BK support activities. However, there are obstacles for the BK/Counselor Teacher in making it happen. This article is provides an overview of the constraints of counselors/counselors in schools in carrying out services and provide solutions. The method specified in this article uses library research. A literature study is an attempt to obtain relevant information according to the topic being studied. The results obtained show that there are still many BK/Counselor Teachers who cannot carry out BK services due to the absence of hours to enter class to carry out assignments

Keywords: *Obstacles, Guidance and Counseling Teachers, Guidance and Counseling Services, Solutions.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah wadah siswa mengembangkan potensi. Menurut Nuraini (2022) pendidikan berperan sebagai institusi guna memaksimalkan potensi siswa. Pentingnya pendidikan ini yaitu untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi yang berguna untuk dirinya, masyarakat, dan negara (UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 1). Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha bagi pendidik agar bisa mengembangkan setiap potensi anak didiknya dan dengan potensi tersebut dapat tercapainya tujuan dari pendidikan yang berguna bagi peserta didik itu sendiri, agama, dan negara.

Pendidik disini, tidak hanya Guru yang mengajar matapelajaran tertentu namun didalamnya termasuk juga guru BK/konselor. Tanggungjawab Guru BK/Konselor memasuki bidang pendidikan untuk memberikan layanan konseling dan memiliki kewenangan penuh (Permana, 2015; Arwan, 2019) kepada peserta didik dengan harapan mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif guna tercapainya tujuan dari pendidikan itu sendiri (berkembangnya KES, mengatasi KES-T) (Prayitno, 2018) karena dalam BK terdapat beberapa bidang layanan guna mengoptimalisasikan potensi siswa. Bidang layanan ini berupa bidang pribadi, akademik, sosial, dan karir (Yusuf, 2009). Sarana dan prasarana BK berpengaruh terhadap keefektifan pelayanan yang diberikan. Dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai akan membantu memaksimalkan pelayanan BK di sekolah (Permana, 2018).

Idealnya, sekolah merealisasikan seluruh layanan dan kegiatan pendukung agar tercapainya tujuan dari pendidikan dan BK itu sendiri juga membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Namun, terdapat beberapa sekolah yang belum dapat melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung tersebut dikarenakan beberapa kendala, seperti: keterbatasan waktu, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya kerjasama. Sesuai dengan fenomena yang terjadi banyak Guru BK/Konselor yang tidak dapat melaksanakan layanan BK yang sesuai dengan semestinya. Seperti penelitian dari Sari (2013) bahwa faktor penghambat pelaksanaan layanan BK adalah kurangnya kerjasama antar personil sekolah dalam membantu Guru BK/Konselor.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2020), sebagian besar program BK tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan, kecuali konseling individu dan kelompok yang responsif. Penelitian dari Pratiwi & Muis (2013); Purwaningrum (2018); Nugroho, Khasanah, Pangestuti, & Kholili (2021) bahwa problematika Guru BK/Konselor yaitu fasilitas yang kurang memadai dalam melaksanakan pelayanan konseling dan tidak adanya jam khusus untuk melaksanakan pelayanan BK sehingga pelayanan konseling tidak terlaksana secara terjadwal. Penelitian Milenda & Muhroji (2022) mendapatkan hasil bahwa sarana dan prasarana BK belum memadai dan kerjasama antar pihak sekolah belum bekolaborasi dengan baik

Kemudian, hasil penelitian dari Riswani (2018) terdapat Guru BK/Konselor yang masih memegang siswa asuh sebanyak 250 hingga 300 peserta didik Pelaksanaan BK dapat berjalan baik dengan adanya kreativitas dari Guru BK/Konselor (Permana, 2015). Banyak cara untuk tetap dapat melaksanakan pelayanan BK, jadi bagaimana Guru BK/Konselor mampu berfikir kreatif agar pelayanan BK tetap dapat berjalan meskipun tanpa adanya jam masuk dan kurangnya sarana dan prasarana di sekolah dan mengembangkan kompetensinya sebagai seorang ahli.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka. Studi pustaka merupakan salah satu bentuk metode penelitian kualitatif yang memanfaatkan buku-buku ilmiah, artikel, makalah, dan sumber lainnya untuk mengumpulkan dan menelaah informasi relevan yang sesuai dengan topik penelitian (Nazir, 2003). Pada artikel kali ini akan membahas mengenai pelayanan BK, pelaksanaan pelayanan BK, dan peran personil sekolah dalam melaksanakan pelayanan BK serta bagaimana solusinya dalam mengatasi permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dari Aspek Jumlah Guru Bimbingan dan Konseling

Membantu peserta didik mengembangkan potensi sesuai dengan tahap perkembangan dan untuk secara aktif berkontribusi pada pembentukan anggota masyarakat yang produktif adalah tugas yang secara konseptual mendasari pekerjaan Guru BK/Konselor. Di semua tingkatan pendidikan, BK ditangani oleh Guru BK/Konselor dengan perbandingan satu Guru BK/Konselor melayani 150 speserta didik (Pribadi, 2020; Permendikbud No. 111 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 2; Sari & Aryansah, 2020). Bimbingan ini dapat dilakukan pelayanan tatap muka terjadwal di dalam kelas maupun di luar kelas.

Kebijakan mengenai alokasi jam BK semua kegiatan tiap minggunya diselenggarakan seperti yang disebutkan di atas yaitu di dalam kelas dan di luar kelas, dengan kegiatan tatap muka secara klasikal diselenggarakan menggunakan layanan informasi, kegiatan instrumentasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, dan lain sebagainya dengan volume kegiatan klasikal ialah 2 jam/kelas (dilaksanakan secara terjadwal) dan kegiatan di luar jam pembelajaran yaitu konseling perorangan, bimbingan dan konseling kelompok, mediasi, advokasi, dan lain sebagainya dengan volume kegiatan 2 jam (Purwanti & Yusuf, 2019).

Namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam pembagian tanggung jawab di antara para Guru BK/Konselor. Berbagai penelitian telah dilakukan hingga saat ini, dan semuanya mengungkapkan bahwa sulit untuk secara efektif mengelola beban kerja dan menghitung jam kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika penentuan beban kerja tidak direncanakan secara efektif, atau ketika tidak diatur sesuai standar, maka akan berdampak pada kinerja yang tidak efektif dan efisien, yang dapat mengganggu kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuannya (Pribadi, 2020).

Kendala dari Aspek Sarana dan Prasarana

Kegiatan BK membutuhkan berbagai sarana dan prasarana. Fasilitas BK adalah sumber daya yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk pelayanan BK, seperti: perangkat elektronik untuk memproses dan menyimpan data klien, instrumen konseling, dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya Prasarana BK merupakan mekanisme yang dapat digunakan secara tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pelayanan BK, seperti: ruangan. Suherman (2007) menegaskan bahwa untuk mencapai program perencanaan BK yang efektif dan efisien, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Hal-hal tersebut antara lain menganalisis kebutuhan siswa, menentukan tujuan BK, menganalisis situasi sekolah, menentukan bentuk kegiatan yang akan dilakukan, menentukan metode pelaksanaan kegiatan, menentukan personel kegiatan, menyiapkan sarana dan biaya kegiatan, serta memperkirakan kendala kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk mengatasinya. Menurut Sukardi (2008) yang mendukung pernyataan tersebut, penyelenggaraan layanan BK di sekolah akan berjalan lancar dan sebagaimana dimaksud asalkan didukung oleh fasilitas BK yang memadai.

Dalam pembuatan program bimbingan dan konseling, Gysbers (Putranti, 2012) menyatakan bahwa salah satu indikator kunci yang perlu diperhatikan adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Kategori ruangan yang dibutuhkan di BK sebagai berikut: 1) ruang konseling individu; 2) ruang tamu; 3) ruang bimbingan dan konseling kelompok; 4) ruang data; dan 5) ruang konseling perpustakaan (disebut juga *bibliocounseling*) (Putranti, 2015). Menurut Depdiknas (2008), ruang BK idealnya berukuran 3 meter kali 3 meter. Dengan demikian sesuai dengan pendapat Gysbers (Putranti, 2015), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan faktor penting yang harus diperhatikan.

Kendala dari Aspek Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling

Melaksanakan konseling dibutuhkan kemampuan, keterampilan, serta kesiapan Guru BK/Konselor terhadap peserta didik. Dalam menjalankan tugasnya, Guru BK/Konselor harus memiliki keterampilan dasar. Menurut KBBI, kompetensi ialah kemampuan, kewenangan dalam memutuskan (Depdiknas, 2008). Begitupun pendapat lainnya, menjelaskan kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap seorang guru (Kunandar, 2007; Mulyasa, 2008). Kompetensi personal, kompetensi sosial, kemampuan pedagogik, dan kompetensi profesional ialah empat kemampuan mendasar yang harus dimiliki seorang Guru BK/Konselor (Prayitno, 2018; Muhammad & Patriana dalam Arwan, 2019).

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kompetensi guru berkaitan dengan penguasaan teori dan psikologis peserta didik. Kompetensi pedagogik spesifik bagi Guru BK/Konselor:
 - a. Mengaplikasikan teori dan praktik pendidikan bk.
 - b. Menerapkan prinsip perkembangan psikofisiologis dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling.
 - c. Menganalisis hakikat penyelenggaraan layanan BK pada semua jenjang pendidikan (Syukur, Neviyarni, & Zahri, 2019).
2. Kompetensi pribadi, yang meliputi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berintegritas, kinerja berkualitas, mengembangkan kualitas diri, mandiri, serta sebagai teladan. Kompetensi kepribadian spesifik bagi Guru BK/Konselor:
 - a. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME dalam penyelenggaraan pelayanan BK.
 - b. Menghormati martabat manusia.
 - c. Pendidik harus bertindak dengan kejujuran dan integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
 - d. Kinerja yang tinggi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling (Syukur, Neviyarni, & Zahri, 2019).
3. Kompetensi sosial, yaitu berkolaborasi dengan personil sekolah, bergaul dengan peserta didik, rekan kerja, lembaga pendidikan, dan orangtua peserta didik. Kompetensi sosial spesifik bagi Guru BK/Konselor:
 - a. Berkolaborasi dengan seluruh personil sekolah.
 - b. Ikut organisasi dan kegiatan keprofesionalan bimbingan dan konseling.
 - c. Berkolaborasi dengan profesi lain berkaitan dengan peserta didik (Syukur, Neviyarni, & Zahri, 2019)
4. Penguasaan konsep dan praktik untuk memahami situasi aktual kebutuhan dan masalah siswa, serta penguasaan kerangka teori dan praktik konseling, melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi proses konseling dan hasil konseling, serta kesadaran profesional merupakan komponen penting dari kompetensi profesional, integritas dan komitmen yang teguh (Syukur, Neviyarni, & Zahri, 2019).

Peran Personil Sekolah dalam Melaksanakan Bimbingan dan Konseling

Kepala Sekolah dan seluruh Guru bertanggungjawab dalam pelaksanaan pelayanan BK sebagai upaya membantu mengoptimalkan potensi peserta didik (Siahaan, 2019). Jika komponen sekolah, antara lain Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Koordinator Bimbingan, Guru Mata Pelajaran, Wali Kelas, dan Tenaga Administrasi semua berkolaborasi, maka layanan konseling di sekolah akan lebih berhasil dilaksanakan (Devino, Bahri, & Husen, 2022). Kepala Sekolah merupakan seorang titik pusat dalam mengatur irama sekolah, pada BK Kepala Sekolah sebagai penggerak dan pendukung terlaksananya pelayanan BK (Putranti, Fithroni, & Kusumaningtias, 2020). Selain itu, Kepala Sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan penyediaan fasilitas pendukung BK yang sedang berlangsung (Luddin, 2013; Yulmi, et al. 2017); dalam rangka kerjasama pelaksanaan bimbingan dan koordinasi kegiatan BK dengan kegiatan lain, membangun kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah (Yulmi, dkk. 2017).

Peran Guru Mata Pelajaran dalam pelaksanaan BK dalam situasi dimana Guru Mata Pelajaran memiliki lebih banyak kemungkinan untuk berinteraksi langsung dengan siswa, antara lain sebagai berikut (Rohayati, 2011):

1. Sebagai sumber informasi dan sebagai pengajar yang melakukan pendekatan pedagogis instruktif, termasuk penelitian laboratorium dan lapangan.
2. Sebagai koordinator dan pengurus acara dan kegiatan skolastik.
3. Guru dalam perannya sebagai motivator memiliki kemampuan memotivasi siswa agar dapat meningkatkan potensi siswa, menumbuhkan semangat belajar, dan menciptakan kreativitas agar proses belajar mengajar dapat berlangsung.
4. Guru bertindak sebagai direktur, membimbing siswa melalui berbagai latihan pembelajaran.
5. Instruktur adalah orang pertama yang mendapatkan konsep karena perannya sebagai inisiator.
6. Selain berperan sebagai transmitter, guru juga berperan sebagai pemberi kebijakan dalam proses pembelajaran.
7. Sebagai pengajar yang memberikan fasilitas untuk belajar dan mengajar. Peran ini dikenal sebagai fasilitator.
8. Peran guru sebagai mediator dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu hal yang penting.
9. Pengajar dalam kapasitasnya sebagai evaluator berwenang melakukan penilaian akademik maupun penilaian perilaku sosial siswa.

Peran Staf Administrasi dalam pelaksanaan BK ialah (Partowisastro dalam Yulmi, dkk. 2017) : 1) membuat kartu personal siswa, 2) tempat menyimpan catatan dan data siswa 3) membuat laporan dan pengumpulan data mengenai siswa, 4) menyiapkan alat pengumpulan data siswa. Dengan demikian, pelaksanaan BK tidak hanya dilakukan oleh Guru BK/Konselor sendiri. Namun diperlukannya tenaga lain agar tujuan dari pelayanan BK dapat terlaksana dengan baik. Setiap orang yang bekerja di sekolah yang berkontribusi dalam pelaksanaan BK bekerja untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemampuan akademik siswa dan mencerdaskan anak bangsa (Sutoyo & Supriyanto, 2015).

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, Permasalahan, dan Solusinya

Peserta didik akan selalu menghadapi permasalahan. Secara umum, masalah yang sering dihadapi peserta didik adalah masalah pribadi, belajar, sosial, dan karir (Tohirin, 2009). Disinilah peran Guru BK/Konselor sebagai ahli yang profesional dalam membantu peserta didik dan melaksanakan pelayanan mengikuti jadwal pelaksanaan yang telah di rancang. Sesuai dengan ketentuannya pelaksanaan BK dilaksanakan dua jam di setiap minggunya (Permendikbud No. 111 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 4 dan 5). Namun, dari fenomena yang terjadi masih banyak Guru BK/Konselor yang terkendala dalam melaksanakan pelayanan BK. Meski begitu, Guru BK/Konselor diuntut kreatif agar pelayanan BK tetap terlaksana dan peserta didik berkesempatan mengenali potensi dan dibantu untuk menyelesaikan persoalan yang mengganggu.

Pada saat masa orientasi Guru BK/Konselor memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan BK agar peserta didik mengenali serta memahami apa itu BK, fungsi dari BK, manfaatnya, tujuan dari BK, serta mengapa peserta didik harus mengikuti pelayanan BK di sekolah. Dalam BK terdapat layanan orientasi, maka disinilah kesempatan Guru BK/Konselor untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini dapat dibicarakan kepada Kepala Sekolah dan tentunya saling bekerjasama dengan personil sekolah lainnya.

Pengadaan sarana dan prasarana BK dapat dilakukan dengan menganalisis kebutuhan apa saja yang

dibutuhkan, Guru BK/konselor membuat proposal pengadaan, mengusulkannya kepada Kepala Sekolah, lalu melakukan tindak lanjut. Jika untuk melaksanakan bimbingan kelompok, Guru BK/Konselor dapat memanfaatkan ruangan yang memungkinkan digunakan seperti ruang kelas. Kondisi sarana dan prasarana harusnya tidak menjadi masalah bagi Guru BK/Konselor dalam melaksanakan kegiatan BK, namun Guru BK/Konselor dapat berpikir kreatif agar pelayanan dapat tetap dilaksanakan. Menurut Fitriani, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana (2022) Kepala Sekolah menyediakan anggaran agar ruangan khusus BK dapat terpenuhi.

Novianto (2013) berpendapat bahwa sekolah yang memberikan jam khusus bagi konselor/konselor bimbingan untuk memberikan pelayanan akan memberikan manfaat, seperti siswa memahami fungsi konseling, program konseling yang telah dirancang dapat dilaksanakan, hubungan emosional antara konselor/konselor dengan siswa terjalin dengan baik, dan siswa mampu termotivasi untuk selalu mengutamakan BK. Guru BK/Konselor yang tidak memiliki jam masuk kelas di setiap minggunya, dapat memberikan layanan diluar jam pelajaran. Fitriani, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana (2022) menyatakan bahwa Guru BK/Konselor yang tidak memperoleh jam khusus ke dalam kelas untuk memberikan layanan bisa memanfaatkan waktu luang dan jam di luar jam pelajaran untuk memberikan pelayanan.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya, Guru BK/Konselor juga dapat bekerjasama dengan personil sekolah lainnya. Jika terjadi permasalahan dalam belajar maupun sosial, Guru matapelajaran dan Wali Kelas dapat melakukan alih tangan terhadap peserta didik kepada Guru BK/Konselor guna membantu peserta didik menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Jadi disini, Guru matapelajaran dan Guru BK/Konselor saling bekerjasama untuk membantu peserta didik. Salah satu solusi pelaksanaan layanan BK agar berjalan dengan baik ialah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu internal sekolah seperti Kepala Sekolah, Guru Matapelajaran, Wali Kelas maupun luar sekolah seperti Orangtua peserta didik atau Wali dan *Stakeholder* yang mendukung terlaksananya pelayanan BK (Fitriani, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, 2022). Kemudian pendapat dari Kusuma (2021) dengan adanya kerjasama antara personil sekolah dapat membantu untuk lebih memahami karakteristik peserta didik.

Guru BK/Konselor juga bisa mengembangkan kompetensinya sebagai guru yang profesional dengan meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional dengan melakukan berbagai kegiatan mendukung seperti seminar, *workshop*, dan MGBK. Sesuai dengan pendapat Fitriani, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana (2022) bahwa dalam melaksanakan tugasnya juga penting bagi Guru BK/Konselor untuk terus meningkatkan pengetahuan agar dapat memberikan bantuan dan solusi yang lebih baik kepada peserta didik.

SIMPULAN

BK sebagai tempat bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi, membantu dalam menyelesaikan permasalahan, serta kesulitan pada bidang pribadi peserta didik, sosial, belajar, maupun karir. Dalam memberikan bantuan perlunya terlebih dahulu melakukan need assesment guna merancang program BK agar pelayanan BK tersusun secara sistematis, terstruktur, dan tepat. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Guru BK/Konselor terkendala dalam melaksanakan layanan tersebut dikarenakan tidak adanya waktu masuk kelas dan waktu luang pun sulit didapat. Namun terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh Guru BK/Konselor agar pelayanan BK tetap dapat dilakukan. Guru BK/Konselor mesti kreatif agar terlaksananya pelayanan BK ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwan, Z. (2019). Pendidik dan Konselor dalam Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional dan Sosial Prespektif Konseling Pendidikan Islam. In *International Seminar and Conference Guidance and Counseling Collaboration Departement Guidance and Counseling Islamic (Fitk-Uinsu Medan) With Academy of Tarbiyah Science Al Ittihadiyah* (p. 488).
- Bahri, S. (2020). Studi evaluasi kinerja guru bimbingan dan konseling di sekolah. *Pencerahan*, 14(1), 39-61.
- Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi, P., Fithroni, F., & Ningtias, D. K. (2020). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*. 3(2), 159-167.
- Fitriani, E., Neviyarni, N., Mudjiran, M., & Nirwana, H. (2022). Problematika Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Naradidik: Journal of Education & Pedagogy*. 1(3), 174-180.

- Kunandar. (2007). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Y. Y. (2021). Analisis Kesiapan Guru Kelas dalam Mengimplementasikan Pembelajaran Tematik di Masa Pandemi Covid-19 di SD Pahlawan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. 3(2), 50-55.
- Milenda, S. S & Muhroji. (2022). Layanan Bimbingan dan Konseling Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Basicedu*. 6(3), 4869-4875.
- Mulyasa, E. (2008). *Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi)*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D. A., Khasanah, D. N., Pangestuti, I. A. I., & Kholili, M. I. (2021). Problematika Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMA: A systematic Literature Review (SLR). *Teraputik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(1), 87-96.
- Nuraini, H. (2022). Kompetensi guru BK berbasis gender equality and social inclusion (gesi) di kota banjarmasin. *Jurnal Bimbingan dan Konseling ArRahman*, 8(2), 162-170.
- Permana, S. A., Syahniar, S., & Daharnis, D. (2014). Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kerinci. *Konselor*. 3(4), 168-179.
- Permana, E. J. (2015). Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banjarnegara. *Psikopedagogia*. 4(2), 143-151.
- Permana, S. A. (2018). Kerjasama Guru Bk dengan Personel Sekolah dalam Melaksanakan Kegiatan Layanan Bk di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kerinci. *Menara ilmu*. 12(1).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Purwanti & Yusuf, A. (2019). Studi Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Untan Pontianak Tahun 2017. *Proceeding International Conference On Teaching and Education (ICoTE)*. 2, 159-167.
- Putranti, D., Fithroni, F., & Kusumaningtias, D. (2020). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Prakarsa Paedagogia*. 3(2), 159-167.
- Pratiwi, J. R. E & Muis, T. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di SMAN 1 Menganti SMAN 1 Driyorejo dan SMA Al Azhar Kabupaten Gresik. *Jurnal BK UNESA*. 3(1), 427-436.
- Prayitno. (2018). *Konseling Profesional yang Berhasil: Layanan dan Kegiatan Pendukung*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Pribadi, J. (2020). Menilik Beban Guru BK di Langkat. *Jurnal Sintaksis*. 3(1), 17-23.
- Purwaningrum, R. (2018). Bimbingan dan Konseling Komprehensif sebagai Pelayanan Prima Konselor. *Jurnal Ilmiah Konseling*. 18(1), 18-27.
- Putranti, D. (2015). Studi Deskriptif tentang Sarana dan Prasarana Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama. *Psikopedagogia*. 4(1), 45-50.
- Riswani, R. (2018). Kejenuhan di Kalangan Guru Bimbingan dan Konseling di SMAN Provinsi Riau. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*. 1(2), 92-104.
- Sari, E. R. (2013). Resistor Factor Implementation Guidance and Counseling Program in High School of The Metro city. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 1-12.
- Sari, S. P & Aryansah, J. E. (2020). Analisis Penetapan Beban Kerja Guru BK di Kota Palembang. *Manajemen Pendidikan*. 15(1), 12-18.
- Suharsimi, A & Yuliana, L. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suherman, U. (2007). *Manajemen Bimbingan dan konseling*. Rizki Press: Bandung.
- Sukardi, D. K. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka cipta.
- Syukur, Y., Neviyarni., & Zahri, T. N. (2019). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Malang: IRDH Book Publisher.
- Tohirin. (2009). *BK di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ulfah, U. (2022). Pelatihan Penyusunan Program BK untuk Meningkatkan Layanan Bimbingan dan Konseling. *Karya Abdi Masyarakat*. 6(2), 237-246.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Walgito, B. (2005). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Winkel. (2010). *BK di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Yusuf, S. (2009). *Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: Rizqi Press.